

# 2022

## INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI ANGGARAN (KIA)

Provinsi Riau dan 12 Kabupaten/Kota Tahun 2022



**Penulis:**  
Tarmidzi

**Tim Tracking:**  
Suci Lestari Putri, Sartika Dewi

## Bagian I: Pendahuluan

# Latar Belakang

Lahirnya Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi titik tolak penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan akuntable. Dalam perkembangannya, implementasi UU KIP sejak tahun 2010 yang lalu menjadi landasan hukum untuk menjamin hak setiap orang untuk memperoleh Informasi dan mewajibkan Badan Publik untuk menyediakan dan melayani permintaan Informasi, serta kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Kinerja Keterbukaan Informasi publik menjadi salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintah yang harus dilaporkan pemerintah setiap akhir tahun, begitu juga melalui Komisi Informasi melakukan penilaian kinerja keterbukaan informasi bagi seluruh pemerintah daerah. Berkaitan dengan informasi anggaran merupakan informasi publik yang wajib diumumkan secara proaktif melalui sistem informasi seperti website dan media lainnya. Bahkan melalui PP No. 45 Tahun 2017 memandatkan kepada pemerintah daerah wajib mempublikasikan informasi anggaran mulai pada tahap perencanaan, pembahasan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Selain penilaian kinerja keterbukaan informasi yang dilakukan Komisi Informasi setiap tahunnya, publik juga dapat melakukan penilaian yang sama, sebagaimana tujuan lahirnya UU KIP yang menjamin hak setiap warga terhadap informasi publik. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan Fitra Riau pada tahun 2022, kinerja keterbukaan informasi anggaran (KIA) di Provinsi Riau dan 12 kabupaten/kota masih dalam kategori belum proaktif, temuan ini berdasarkan penelusuran di website resmi pemerintah daerah yang tidak menyediakan informasi anggaran yang terbaru.

Sebagai bagian dari partisipasi masyarakat sipil, Fitra Riau setiap tahunnya terus melakukan penilaian kinerja keterbukaan informasi publik, khususnya informasi yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah di Provinsi Riau dan 12 Kabupaten/Kota se-Riau yang dikemas menjadi Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran (KIA), Penilaian ini bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntable, sekaligus sebagai upaya dalam perbaikan tata Kelola keuangan daerah yang baik.

## Tujuan

Adapun tujuan dari melakukan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah, adalah;

- Mengukur sejauh mana kinerja keterbukaan informasi anggaran (KIA) pemerintah daerah Provinsi Riau dan 12 Kabupaten/kota;
- Menyusun hasil indeks keterbukaan informasi Anggaran (KIA) pemerintah daerah se – Riau tahun 2022;
- Mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## Ruang Lingkup

Penilaian KIA 2022 ini dibatasi pada informasi anggaran daerah dengan ruang lingkup sebagai berikut;

- Studi ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, dengan dua kriteria utama keterbukaan informasi anggaran secara proactive, yaitu ketersediaan informasi / dokumen dan aksesibilitas informasi anggaran. Aksesibilitas dengan tiga kategori penilaian, terdiri dari informasi/dokumen dipublikasikan secara lengkap (full dokumen),

publikasi sebagian isi informasi/dokumen, dan ringkasan informasi/dokumen, kemudian diberikan bobot nilai yang berbeda dari masing-masing informasi tersebut.

- Metode penilaian berdasarkan tracking website pemerintah daerah, kemudian disusun menjadi Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran (KIA), Informasi yang di nilai yaitu; Informasi Perencanaan Pembangunan, Rancangan APBD, Dokumen APBD dan Pertanggungjawaban APBD. Penelusuran informasi dilakukan sampai pada tanggal 30 Desember 2022;

## Metode Penelitian

Berikut metode penilaian dan bobot masing-masing indicator kinerja keterbukaan informasi Anggaran (KIA) Provinsi Riau dan 12 Kabupaten/kota Tahun 2022. Selanjutnya dari masing-masing nilai indeks maka ditetapkan kedalam kategori penilaian yaitu; kategori rendah antara 0,00-0,20, kategori cukup antara 0,20-0,40, kategori sedang antara 0,40-0,60, kategori tinggi antara 0,60-0,80, kategori sangat tinggi antara 0,80-100.



Dimensi	Bobot	Dokumen Informasi	Nilai
Dokumen Perencanaan Pembangunan	0,15	RPJMD Periode 2021-2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Publikasi Full (4)</li> <li>• Publikasi Sebagian (2)</li> <li>• Publikasi Ringkasan (1)</li> <li>• Tidak ada publikasi (0)</li> </ul>
		RKPD 2022	
		RKPD 2023	
Dokumen Proses Penganggaran	0,30	Rancangan Dokumen KUA 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Publikasi Full (4)</li> <li>• Publikasi Sebagian (2)</li> <li>• Publikasi Ringkasan (1)</li> <li>• Tidak ada publikasi (0)</li> </ul>
		Rancangan Dokumen KUA 2023	
		Rancangan Dokumen PPAS 2022	
		Rancangan Dokumen PPAS 2023	
		Dokumen RKA 2022	
		Dokumen RKA 2023	
		RAPBD 2022	
Dokumen Anggaran	0,30	Dokumen KUA 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Publikasi Full (4)</li> <li>• Publikasi Sebagian (2)</li> <li>• Publikasi Ringkasan (1)</li> <li>• Tidak ada publikasi (0)</li> </ul>
		Dokumen KUA 2023	
		Dokumen PPAS 2022	
		Dokumen PPAS 2023	
		Dokumen APBD (Perda) 2022	
		Dokumen APBD (Perda) 2023	
		Dokumen Penjabaran APBD 2022	

		Dokumen DPA 2022	
Dokumen Pertanggungjawaban/ Audit	0,25	Dokumen LKPD 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Publikasi Full (4)</li> <li>• Publikasi Sebagian (2)</li> <li>• Publikasi Ringkasan (1)</li> <li>• Tidak ada publikasi (0)</li> </ul>
		Dokumen LKPD 2022	
		Dokumen LHP BPK 2021	
		Dokumen LHP BPK 2022	

## Bagian II: Hasil Peringkatan Indeks Keterbukaan Informasi (KIA)

Fitra Provinsi Riau secara konsisten setiap tahunnya melakukan pemeringkatan kinerja keterbukaan informasi anggaran bagi pemerintah daerah se- Provinsi Riau. melalui pemeringkatan ini dilaksanakan dengan pendekatan penelusuran saluran informasi resmi pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap amanat UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik, salah satunya informasi yang wajib diumumkan adalah informasi anggaran yang di kelola oleh pemerintah daerah setiap tahun.

### Peringkat Indeks KIA Daerah Se-Riau Tahun 2022

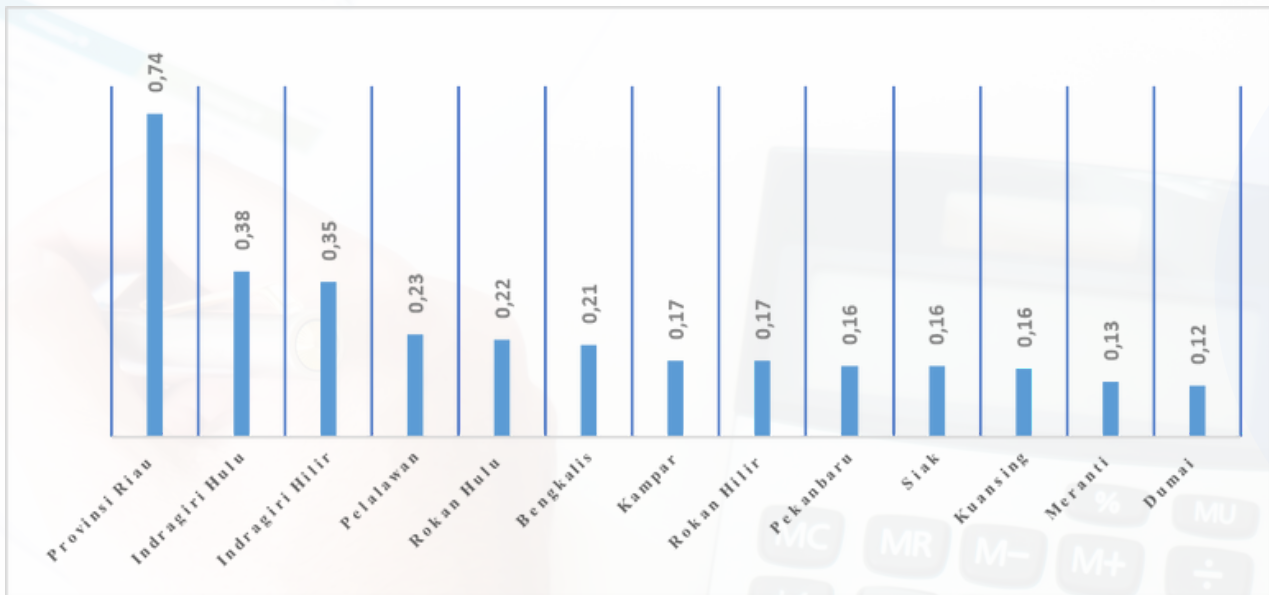
Hasil pemeringkatan Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran (KIA) tahun 2022, menunjukkan bahwa kinerja keterbukaan informasi bagi pemerintah daerah se-Riau masih dalam kategori rendah dan belum menunjukkan perbaikan kinerja yang signifikan dari tahun sebelumnya.

Peringkat indeks KIA tahun 2021 rata-rata mencapai 0,13, sedangkan hasil pemeringkatan indeks KIA tahun 2022 naik dengan rata-rata indeks mencapai 0,25.

Daerah dengan peringkat indeks tertinggi terdapat pada pemerintah Provinsi Riau dengan nilai indeks mencapai 0,74 atau dalam kategori tinggi.

Sedangkan untuk peringkat indeks Kabupaten/Kota belum optimal dengan indeks tertinggi hanya mencapai kategori cukup. Daerah dengan kategori cukup yaitu Kabupaten Indragiri Hulu nilai indeks mencapai 0,38, selanjutnya Indragiri Hilir mencapai 0,35, Pelalawan 0,23, Rokan Hulu 0,22, Bengkalis 0,21. Selanjutnya daerah dengan kategori rendah yaitu Kabupaten Kampar dan Rokan Hilir masing-masing 0,17, Kota Pekanbaru, Siak, dan Kuansing masing-masing 0,16, Meranti 0,13 dan Kota Dumai 0,12.

**Table1;** Peringkat Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran (KIA) Tahun 2022



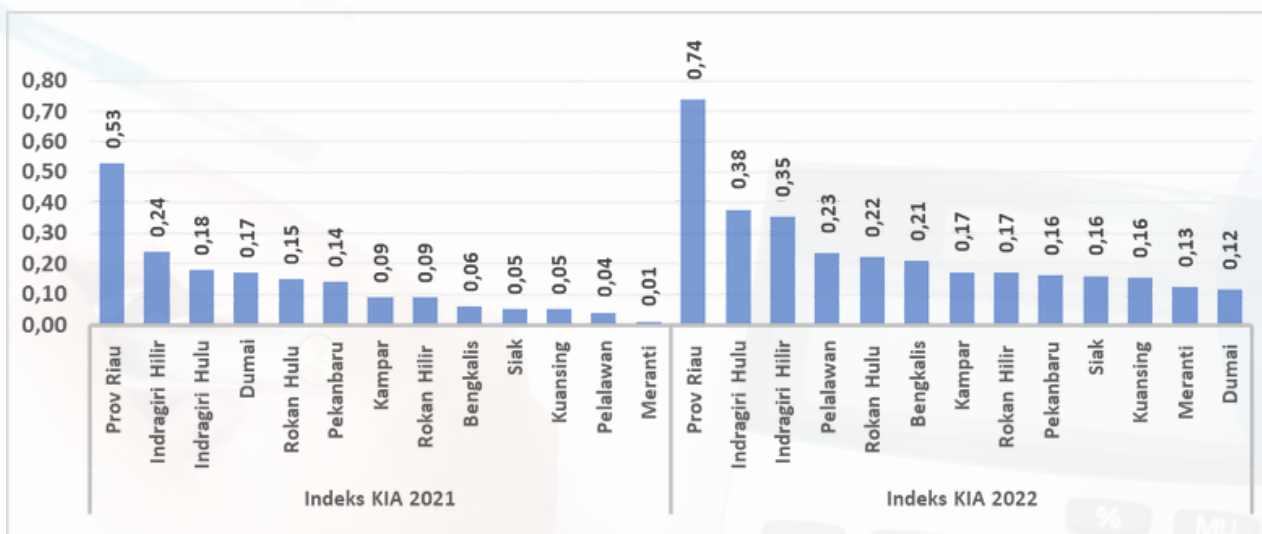
### Perbandingan Hasil Indeks KIA Tahun 2021-2022

Jika dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya, peringkat indeks KIA bagi pemerintah daerah secara keseluruhan terjadi peningkatan kinerja. Pada tahun sebelumnya indeks tertinggi hanya mencapai kategori sedang yaitu terdapat pada Provinsi Riau mencapai 0,53. Begitu juga indeks kabupaten/kota hanya mencapai pada kategori cukup dan rendah yaitu antara 0,01- 0,24. Peningkatan kinerja keterbukaan informasi ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah terhadap perbaikan kinerja keterbukaan informasi semakin baik, meskipun peningkatan kinerjanya belum maksimal.

Peringkat daerah dari tahun 2021-2022 terjadi pergeseran berdasarkan hasil penilaian indeks KIA, misalnya kabupaten Indragiri hulu tahun berada

berada diperingkat tiga dengan indeks 0,18, kemudian naik pada tahun 2022 di peringkat kedua dengan indeks 0,38. Sebaliknya Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021 berada diperingkat kedua dengan indeks 0,24, kemudian pada tahun 2022 turun menjadi peringkat ketiga dengan indeks 0,35. Kemudian daerah dengan peningkatan cukup baik yaitu Kabupaten Pelalawan, tahun 2021 berada diperingkat dua belas (12) dengan indeks 0,04 kemudian naik diperingkat keempat dengan indeks mencapai 0,23. Sedangkan Kota Dumai pada tahun sebelumnya berada di peringkat empat justru menurun cukup drastis pada tahun 2022 menjadi peringkat terakhir. Daerah lainnya, pada tahun 2022 secara berurutan berada diperingkat kelima sampai kedua belas (12) yaitu Rokan Hulu, Bengkalis, Kampar, Rokan Hilir, Pekanbaru, Siak, Kuansing dan Meranti.



**Table 2;** Perbandingan Indeks KIA Daerah se-Riau tahun 2021-2022

Untuk dicermati bahwa daerah-daerah yang mengalami penurunan kinerja keterbukaan informasi perlu memperhatikan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), aspek yang wajib dipenuhi adalah penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Selain itu, daerah dengan hasil indeks dalam kategori rendah menunjukkan bahwa agenda reformasi birokrasi belum optimal yang tidak didukung komitmen kinerja keterbukaan informasi publik.

### Indeks KIA Tahun 2022 Berdasarkan Empat Dimensi Penilaian

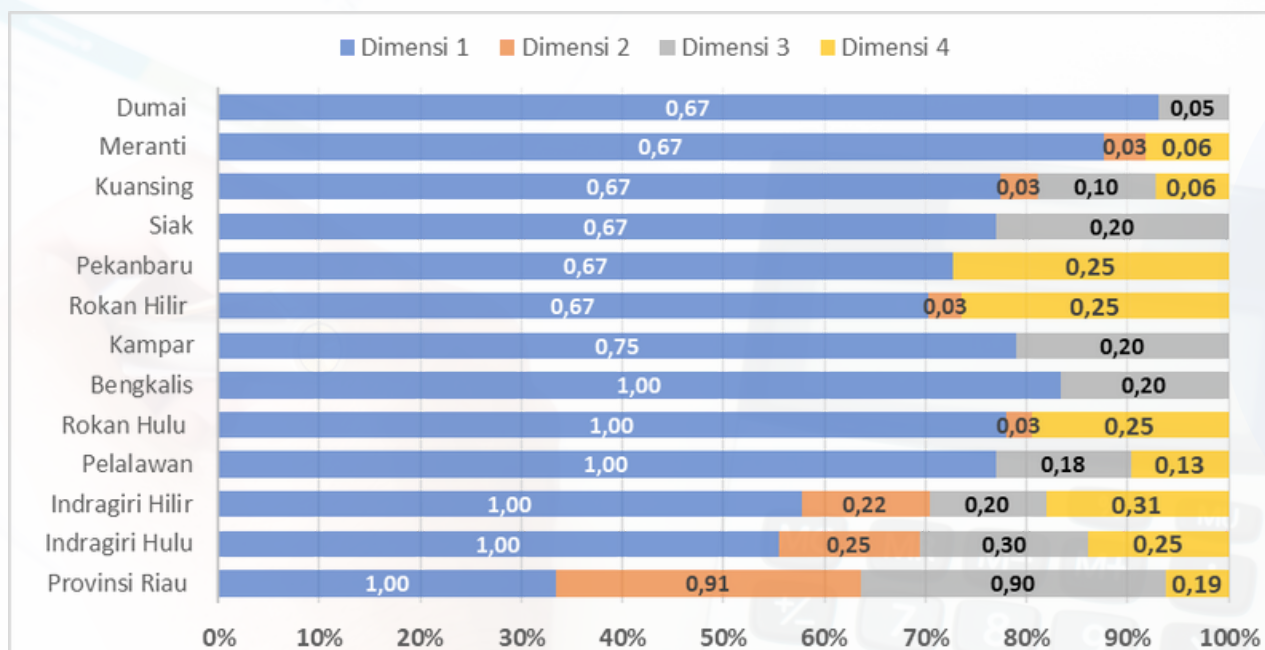
Penilaian Indeks keterbukaan informasi anggaran diukur dari empat dimensi, yaitu dimensi dokumen perencanaan pembangunan, dokumen proses penganggaran, dokumen anggaran dan dokumen pertanggungjawaban atau hasil audit. Dari empat dimensi pengukuran

tersebut, dimensi yang paling lengkap dipenuhi dan dipublikasi pemerintah daerah yaitu informasi yang berkaitan dengan dokumen rencana pembangunan secara rerata mencapai 0,83, artinya hampir seluruh daerah mempublikasikan informasi rencana pembangunannya terdiri dari RPJMD dan RKPD tahun terbaru.

Kemudian pada dimensi proses penganggaran justru paling minim informasi yang ditemui dengan rerata mencapai 0,12, dokumen anggaran rerata mencapai 0,18 dan dokumen pertanggungjawaban rerata mencapai 0,13. Padahal informasi-informasi tersebut baik yang berkaitan dengan proses penganggaran, dokumen anggaran dan pertanggungjawaban APBD, merupakan informasi yang menyangkut dengan kepentingan publik terkait dengan rencana program kegiatan dan anggaran yang setiap tahunnya secara berkala di susun oleh pemerintah daerah.



**Table 3;** Hasil Indeks KIA Berdasarkan Dimensi Penilaian



Hasil penelusuran informasi dari masing-masing dimensi tersebut, daerah yang memenuhi dari empat dimensi penilaian yaitu Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Pelalawan meskipun secara

keseluruhan informasi belum di publikasikan. Sedangkan daerah lainnya belum memenuhi dari empat dimensi yang dinilai, sebagian daerah hanya terdapat dua sampai tiga dimensi yang tersedia di website resmi pemerintah daerah.

### Bagian III: Kesimpulan & Rekomendasi

Berdasarkan hasil indeks keterbukaan informasi anggaran (KIA) yang ditelusuri dan dinilai pada tahun 2022 sebagaimana diuraikan diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut;

#### Kesimpulan;

- Berdasarkan empat aspek penilaian Indeks KIA, belum semua indikator penilaian terpenuhi secara lengkap terutama yang menyangkut dengan dokumen proses penganggaran dokumen anggaran dan dokumen pertanggungjawaban anggaran, informasi yang berkaitan dengan penganggaran ini yang ditemukan masih berupa ringkasan dokumen.
- Kinerja keterbukaan informasi anggaran pemerintah daerah se-Riau dalam dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan kinerja yang positif, hal itu dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil indeks KIA, yaitu pada tahun 2021 indeks rerata provinsi dan kabupaten/kota mencapai 0,13, meningkat pada tahun 2022 menjadi 0,25.
- Hasil indeks KIA tahun 2022 dari keseluruhan daerah terjadi peningkatan nilai indeks kinerja, yaitu dalam kategori tinggi dengan nilai indeks tertinggi mencapai 0,74, sedangkan pada tahun sebelumnya nilai indeks tertinggi hanya mencapai 0,53 atau dalam kategori sedang. Meskipun nilai tertinggi secara berturut-turut terdapat pada pemerintah Provinsi Riau, nilai indeks pemerintah Kabupaten/kota juga mengalami peningkatan nilai indeks dalam kategori cukup dari tahun sebelumnya semua daerah kabupaten/kota dalam kategori rendah.
- Kontribusi nilai indeks tertinggi dari keseluruhan pemerintah daerah masih terdapat pada dimensi dokumen rencana pembangunan, sedangkan pada dimensi dokumen proses penganggaran, dokumen anggaran dan pertanggungjawaban masih sangat minim.
- Hasil indeks KIA 2022 menunjukkan terdapat tujuh daerah yang masih dalam kategori rendah indeks kinerja keterbukaan informasi anggarannya dengan nilai indeks antara 0,17-0,12 yaitu Kabupaten Kampar, Rokan Hilir, Pekanbaru, Siak, Kuansing, Meranti dan Dumai.

## Rekomendasi

- Pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja keterbukaan informasi public menjadi agenda kinerja pembangunan sebagai tujuan dari pencapaian reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik (good governance). Kinerja keterbukaan informasi harus menjadi agenda dalam komitmen kebijakan pemerintah daerah.
- Bagi keseluruhan pemerintah daerah baik Provinsi Riau maupun Kabupaten/Kota untuk tetap penjalankan prinsip yang terbuka/transparan dalam menjalankan pemerintahannya, serta wajib mempublikasikan melalui saluran

informasi yang tersedia, mengingat belum semua aspek penilaian indeks KIA terpenuhi dari empat dimensi yang dinilai.

- Pada dimensi proses penganggaran, dokumen anggaran, dan pertanggungjawaban. Kedepannya pemerintah daerah mempublikasikan informasi yang berkaitan dengan rencana program kegiatan dan anggaran, mengingat pada tahap ini publik sangat berperan dalam memberikan masukan atas rencana-rencana yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.



